

**IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN
SWADAYA (BSPS) DI DESA SELOWOGO KECAMATAN BUNGATAN
KABUPATEN SITUBONDO**

Hari Susanto^{1*)}, Nina Sa'idah Fitriyah^{2*)}, Rif'atul Izzah^{3*)}.

¹Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Email: 201914044@unars.ac.id

Abstrak

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya merupakan fasilitas pemerintah berupa bantuan sosial kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Perumahan swadaya merupakan rumah-rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat, baik secara sendiri maupun berkelompok program ini memiliki tujuan yaitu untuk memberdayakan masyarakat berpenghasilan rendah agar mampu membangun dan meningkatkan kualitas rumah secara swadaya sehingga dapat menghuni rumah yang layak dalam lingkungan yang aman dan sehat. Hasil penelitian dari segi komunikasi, program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Selowogo Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo sudah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan secara efektif untuk memastikan bahwa pesan atau informasi yang disampaikan ataupun diterima sudah baik dan benar agar terhindar dari kesalahpahaman. Dari segi sumber daya, dari tenaga fasilitator lapangan hingga koordinator sudah melaksanakan tugasnya dengan baik sehingga program ini berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Dari segi disposisi, upaya bersama dari tim pelaksana, perangkat desa, dan masyarakat penerima manfaat untuk menjaga komitmen, transparansi, dan akuntabilitas membantu memastikan bahwa program ini berjalan efektif, serta untuk memenuhi kebutuhan mereka dari rumah yang tidak layak huni menjadi rumah yang layak huni sehingga masyarakat dapat tinggal dengan nyaman. Dari segi struktur birokrasi, pembagian tugas yang jelas, dan keterlibatan aktif dari tingkat pusat hingga desa adalah elemen penting dalam menjalankan program BSPS.

Kata Kunci: Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)

Abstract

Rif 'Atul Izzah, NPM. 201914044. "Implementation of the Self-Help Housing Stimulant Assistance Program (BSPS) in Selowogo Village, Bungatan District, Situbondo Regency"

Self-Help Housing Stimulant Assistance (BSPS) is a government facility in the form of social assistance to Low Income Communities (MBR). Self-help houses are houses built on the initiative and efforts of the community, either individually or in groups. This program aims to empower low-income communities to be able to build and improve the quality of

houses independently so that they can live in decent house in a safe and healthy environment. Improving the quality of the house is done by repairing the house. Physical housing assistance is a form of support and improvement of physical infrastructure in the home or residence of an individual or family in need. The main aim of physical housing assistance is to improve living conditions become safer, more comfortable and livable.

This research is a descriptive research with a qualitative approach. The implementation of a program is a complex thing since many factors influence each other in a system which cannot be separated from environmental factors which tend to always change. In fact, the implementation process can be successful seen from the results achieved.

The results of this research reveal that first, from communication, the Self-Help Housing Stimulant Assistance (BSPS) Program in Selowogo Village, Bungatan District, Situbondo Regency is in accordance with the regulations that have been established effectively and clearly to ensure that the message or information conveyed or received is good and correct to avoid misunderstanding. Next, from the resources, field facilitators and coordinators have carried out their duties well so that the BSPS program runs in accordance with applicable procedures. Then, from disposition, joint efforts from the implementation team, village officials and beneficiary communities to maintain commitment, transparency and accountability help to ensure that the BSPS program runs effectively, as well as it meets their needs from uninhabitable to livable houses so that people can live comfortably. Finally, from bureaucratic structure, clear division of tasks, and active involvement from central to village levels become important elements in implementing the BSPS program.

Keywords: Implementation of the Self-Help Housing Stimulant Assistance Program (BSPS)

PENDAHULUAN

Kebijakan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) merupakan bantuan Pemerintah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan kualitas rumah dan pembangunan baru rumah beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum. Memenuhi amanat Undang-Undang akan kebutuhan tempat tinggal dan lingkungan yang layak, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPP) melalui Direktorat Perumahan Swadaya Di rektorat Jenderal Penyediaan Perumahan memenuhi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Maksud dari Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) adalah meningkatkan Prakarsa MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) dalam pembangunan atau peningkatan kualitas rumah yang layak huni, sehat, aman, serasih, dan teratur serta berkelanjutan.

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) merupakan fasilitas pemerintah berupa bantuan sosial kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) merupakan masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah layak huni, penerima Bantuan Stimulan Perumahan

Swadaya (BSPS) yaitu masyarakat miskin atau masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang menempati rumah layak huni. Hal ini juga diatur dalam Surat Edaran Jenderal Perumahan No. 14/SE/Dr/2022 Tentang petunjuk teknis penyelenggaraan program bantuan pembangunan rumah swadaya. Tahapan penyelenggaraan kegiatan BSPS Sejahtera dan BSPS secara garis besar meliputi persiapan yang didalamnya yaitu perencanaan program, dan penganggaran. Kemudian penetapan lokasi kegiatan yang terdiri dari pengusulan kegiatan, verifikasi/penilaian usulan, tahapan penyelenggaraan lalu terakhir meliputi penetapan lokasi, seleksi/pengolahan validasi data dan penyampaian daftar calon penerima bantuan.

Setiap bantuan fisik rumah harus ada perencanaan anggaran yang sangat rinci agar biaya yang dikeluarkan bisa terlihat dengan jelas apa saja yang termasuk dalam daftar anggaran, dalam bantuan BSPS untuk satu unit rumah yaitu 20 juta yang diberikan oleh pemerintah. Jika dalam pelaksanaan rehabilitasi rumah dana yang diberikan kurang mencukupi maka dalam hal ini harus ada swadaya dari masyarakat atau uang pribadi, adapun rincian anggarannya:

Tabel 1.1 Rincian anggaran program BSPS

No	Nama Barang	Satuan	Harga satuan	jumlah
1.	Semen	25 sak	50.000	1.250.000
2.	Pasir	2 dum truk	1.250.000	2.500.000
3.	Paku Usuk	6 kg	25.000	150.000
4.	Kayu Usuk	6 bendel	200.000	1.200.000
5.	Kayu Papan	10 bendel	50.000	500.000
6.	Genteng	1.000	2.000	2.000.000
7.	Batu Belah	4 truk	250.000	1.000.000
8.	Bambu	12	20.000	240.000
9.	Cat Kayu	2 kg	90.000	180.000
10.	Cat Tembok	10 kg	30.000	300.000
11.	Engsel	4	40.000	160.000
12.	Kunci Pintu	1	250.000	250.000
13.	Kusen Pintu	1	800.000	800.000
14.	Kusen Kayu	4 lembar	375.000	1.500.000
15.	Kapur	50 sak	7.000	350.000
16.	Batako	1.000	3.250	3.250.000
17.	Besi Cor 10 A	10 lonjor	88.000	880.000
18.	Kram Jendela	5	100.000	500.000
19.	Kaca Jendela	2	100.000	200.000
20.	Lesplang	10	50.000	500.000
21.	Besi Cor 6 A	10 lonjor	45.000	450.000
22.	Pegangan pintu	2	125.000	250.000
23.	Grendel tanam	1	60.000	60.000
24.	Dongkrak Jendela	2	40.000	80.000
25.	Paku Reng	6kg	25.000	150.000
26.	Upah tukang	4	625.000	2.500.000
TOTAL				20.000.000

Sumber: Desa Selowogo Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo, 2023

Kecamatan Bungatan adalah merupakan Kecamatan di Kabupaten Situbondo yang mendapatkan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Berdasarkan data dari BPS Kecamatan Bungatan, merupakan salah satu wilayah di Kabupaten Situbondo dengan jumlah 7 desa yang terdiri dari Desa Selowogo, Desa Sumber Tengah, Desa Patemon, Desa Pasir Putih, Desa Bungatan, Desa Bletok, dan Desa Mlandingan Wetan. Dengan keseluruhan jumlah penduduk sebanyak 25.982 jiwa.

Tabel 1.2 Data Jumlah Penerima BSPS Kabupaten Situbondo per-Kecamatan Tahun Anggaran 2020-2022

No.	Kecamatan	2020	2021	2022
1.	Panarukan	120	-	-
2.	Mlandingan	19	-	-
3.	Panji	-	40	-
4.	Asembagus	-	20	-
5.	Kapongan	-	37	-
6.	Bungatan	-	-	50
	Jumlah	139	97	50

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPP) Kabupaten Situbondo, 2023

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Desa Selowogo di laksanakan sejak 2022 dengan adanya Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di desa ini diharapkan dapat mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yaitu pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial pada kelompok masyarakat miskin. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.4 Data Jumlah Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Selowogo Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo

NO	DUSUN	JUMLAH
1.	Parsean	4
2.	Krajan	9
3.	Karang Kembang	3
4.	Karang Anyar	3
5.	Karang Nangka	3
6.	Ledeng	6
7.	Bretan	17
8.	Tekong	1
9.	Pagar Gunung	3
10.	Batu Ampar	1
	Jumlah	50

Sumber: Desa Selowogo Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo, 2022

Penelitian ini dilakukan pada program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Selowogo Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo tahun 2022. Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) merupakan bentuk usaha pemerintah dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat yang diberikan oleh Kementerian Perumahan Rakyat kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Berdasarkan fenomena diatas peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian terhadap pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dengan judul penelitian "IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN STIMULAN

PERUMAHAN SWADAYA (BSPS) DI DESA SELOWOGO KECAMATAN BUNGATAN KABUPATEN SITUBONDO”.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif karena data yang dikumpulkan melalui wawancara, dokumentasi dan observasi yang digambarkan melalui kata-kata dengan menganalisis terlebih dahulu data yang telah dikumpulkan.

Tempat dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat penelitian untuk memperoleh data-data yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan yang telah ditetapkan. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Selowogo Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo. Waktu yang digunakan penelitian ini dilakukan peneliti selama 6 bulan, yakni sejak bulan Februari 2023 sampai Juli 2023.

Jenis Data

Data adalah kumpulan fakta atau informasi yang dapat berbentuk angka atau deskripsi yang berasal dari sumber data. Sumber data ialah uraian tentang asal diperolehnya data penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yang menurut Silalahi (2012:284) data kualitatif adalah data yang dalam bentuk bukan angka. Menurut Nur Indrianto dan Bambang Supomo (2013:142) Sumber data merupakan faktor penting yang menjadi pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan data disamping jenis data yang telah dibuat di muka.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah paling utama dan sangat penting dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah :

1. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data melalui pengamatan langsung atau peninjauan secara cermat dan langsung atau lokasi penelitian. Menurut Sugiyono (2014:166) Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologi dan psikologi, dua di antaranya yang terpenting adalah pengamatan dan ingatan.

2. Wawancara

Menurut Silalahi (2012:312) wawancara merupakan suatu metode pengumpulan data berupa percakapan yang berlangsung secara sistematis dan terorganisasi yang dilakukan oleh peneliti sebagai pewawancara (*interviewer*) dengan seseorang atau sejumlah orang sebagai responden atau yang diwawancarai (*interviewee*) untuk mendapatkan sejumlah informasi terkait masalah yang diteliti.

3. Dokumentasi

Dokumen-dokumen yang dibutuhkan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah beberapa dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian yang berguna untuk mendukung data-data dalam penelitian ini. Menurut Usman dan Akbar (2009:69), dokumentasi merupakan teknik untuk memperoleh data yang berasal dari dokumen-dokumen.

Uji Keabsahan Data

Teknik yang digunakan dalam pemeriksaan keabsahan data seperti yang dikemukakan oleh Moleong (2006: 327), adalah perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, triangulasi pengecekan sejawat, analisis kasus negative, kecukupan referensi, dan pengecekan dengan anggota yang terlibat dalam penelitian.

Metode Analisis Data

Huberman mengemukakan dalam Sugiyono (2016:91), aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah model interaktif Milles dan Huberman.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Komunikasi

Salah satu unsur yang dapat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan sebuah program menurut George C. Edward dalam Nugroho adalah komunikasi. Komunikasi dalam konteks penelitian ini digunakan agar pelaksanaan pemberian Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dapat berjalan dengan baik. Komunikasi juga merupakan faktor pendukung utama dalam proses pelaksanaan Program bantuan ini.

Penyampaian informasi merupakan kunci untuk memastikan pesan atau data yang ingin disampaikan dapat dipahami dengan benar oleh penerima, kejelasan dalam penyampaian informasi melibatkan penggunaan kata-kata yang sederhana. Jadi Dapat disimpulkan bahwa sebelum diadakan program BSPS maka perangkat Desa Selowogo mengadakan musyawarah terlebih dahulu dengan masyarakat untuk mencapai kesepakatan dan solusi bersama dalam suatu masalah dengan melibatkan berbagai perspektif dan menghormati perbedaan pendapat. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Bapak Sonya Agung Gatra Sucipto, ST Ahli Muda Penata Kelola Perumahan, yang mengatakan :

"Memang dari awal program ini dilakukan dengan cara musyawarah desa dulu, tujuannya karena musyawarah merupakan hal yang sangat penting agar semua kegiatan berjalan dengan baik dan lancar. Sehingga

tidak ada *miss communication* diantara masyarakat, harus lengkap persyaratan yang ditentukan tujuannya agar masyarakat tidak liar". (Sumber: Wawancara pada Senin 24 Juli 2023, Bapak Sonya Agung Gatra Sucipto, ST (43Th) pukul 09.00 WIB di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPP).

Konsistensi informasi merujuk pada kesesuaian atau kesamaan pesan yang disampaikan dalam berbagai konteks atau waktu. Hal ini untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan tidak saling bertentangan, tidak membingungkan dan tetap sesuai dengan informasi yang telah dijelaskan sebelum-sebelumnya, bahwa menjaga konsistensi dalam penyampaian informasi sangat penting untuk membangun kepercayaan dan menghindari kebingungan. Ketika informasi yang diberikan konsisten dari waktu ke waktu maka akan meminimalkan risiko munculnya kesalahpahaman.

Kepatuhan pelaksana program BSPS terhadap peraturan yang ditetapkan merupakan aspek penting untuk memastikan efektivitas dan transparansi program tersebut. Kepatuhan dari para pelaksana program BSPS dapat mengurangi risiko pelanggaran dan menciptakan lingkungan yang lebih teratur dan aman.

Regulasi pemerintah merujuk pada aturan, peraturan, dan kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah dalam upaya untuk mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat dan sektor-sektor tertentu dalam suatu negara. Persyaratan administrasi yang dibutuhkan bagi masyarakat untuk mengikuti program BSPS yaitu merupakan kartu Identitas diri yang berlaku dalam hal ini yaitu KTP, Kartu keluarga dan surat kepemilikan tanah. Hal ini dikarenakan identitas diri dibutuhkan bahwa masyarakat merupakan betul warga desa yang bersangkutan sehingga berhak untuk memperoleh bantuan tersebut.

Sumber daya

Sumber daya merupakan faktor penting demi terselenggaranya kebijakan dengan baik, maka dengan itu diperlukan sumber daya manusia (SDM) yang cukup serta ditingkatkan *skill* (kemampuan).

Ketersediaan staf yang cukup memiliki peran yang krusial dalam menjaga kelancaran operasional dan produktivitas di berbagai organisasi dan sektor. Staf yang cukup merujuk pada memiliki jumlah pegawai atau tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan tugas dan tanggung jawab yang harus diemban. Staf yang cukup juga memungkinkan pekerjaan beroperasi secara efisien tanpa mengurangi beban kerja yang berlebih dan meningkatkan produktivitas. Staf yang mencukupi memungkinkan tugas dan tanggung jawab dapat diselesaikan dengan baik. Dengan demikian, penting untuk melakukan evaluasi secara teratur guna memastikan bahwa staf yang memadai dan dapat mengatasi tuntutan pekerjaan yang baik.

Anggaran yang memadai adalah aspek kunci dalam manajemen keuangan yang berkaitan dengan alokasi sumber daya finansial untuk mencapai tujuan organisasi

atau individu. Anggaran yang memadai membantu menjaga keseimbangan antara pengeluaran dan pemasukan, serta memastikan bahwa tujuan finansial dapat tercapai dengan efektif. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Bapak Sonya Agung Gatra Sucipto, ST Ahli Muda Penata Kelola Perumahan, yang mengatakan :

"Anggaran untuk BSPS ini 20 juta mbak, dimana 17,5 sebagai bahan bangunan dan 2,5 sebagai upah tukang. Makanya salah satu syarat dari BSPS ini masyarakat harus sudah mempunyai pondasi tujuannya agar dana yang diberikan cukup, kalau tidak memiliki pondasi dana hanya cukup untuk membangun pondasi saja". (Sumber: Wawancara pada Senin 24 Juli 2023, Bapak Sonya Agung Gatra Sucipto, ST (43Th) pukul 09.25 WIB di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPP)).

Fasilitas yang diberikan dalam suatu tempat atau lingkungan biasanya disesuaikan dengan kebutuhan pengguna atau penghuni. Setiap fasilitas ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan preferensi pengguna atau penghuni, dengan tujuan untuk meningkatkan kenyamanan dan produktivitas mereka. Fasilitas yang diberikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk memastikan bahwa sumber daya yang dialokasikan dengan efektif guna memenuhi kebutuhan yang mendesak. Selain itu, fasilitas sesuai yang dibutuhkan untuk meminimalkan hambatan-hambatan saat pelaksanaan program BSPS dilaksanakan.

Kewenangan yang tepat dengan informasi yang jelas adalah kunci untuk mencapai efisiensi, produktivitas, dan keamanan dalam setiap tugas yang dilakukan. Oleh karena itu, berkomitmen untuk memberikan kewenangan yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing individu, dengan informasi yang jelas dan terperinci. Kewenangan yang cukup dan informasi yang jelas tentang program BSPS cukup penting untuk mengambil keputusan dan bertindak secara efektif. Informasi yang jelas dan akurat sangat diperlukan agar keputusan yang diambil berdasarkan pemahaman yang tepat tentang situasi dan dampaknya.

Disposisi

Disposisi adalah watak atau karakteristik yang dimiliki oleh implementor seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis. Disposisi merupakan faktor yang penting dalam pendekatan mengenai pelaksanaan atau kebijakan publik. Komitmen dapat terjadi dalam berbagai konteks, seperti personal, profesional, sosial, atau organisasional. Ini mencerminkan kesediaan dan keyakinan seseorang untuk mengalokasikan waktu, usaha, dan sumber daya untuk mencapai hasil yang diinginkan. Komitmen merupakan pendorong utama dibalik pencapaian dan kemajuan program BSPS, bahwa hal itu melibatkan kesediaan untuk mengambil tanggung jawab, waktu, dan energi serta tetap setia terhadap tujuan yang dipegang. Mengenai hal tersebut juga dibenarkan oleh Bapak Sonya Agung Gatra Sucipto, ST Ahli Muda Penata Kelola Perumahan, beliau mengatakan :

"Leader dari kementerian dengan beberapa TFL dan dari Dinas PUPP mengawasi pembelanjaan serta pembangunan. Agar menghindari Leader dengan penerima kongkalikong, ataupun dari Dinas PUPP dengan penerima kongkalikong jadi pihak leader menegur kami, begitupun sebaliknya. Jadi saling mengisi satu sama lain demi kelancaran program ini". (Sumber : Wawancara pada Senin 24 Juli 2023, Bapak Sonya Agung Gatra Sucipto, ST (43Th) pukul 09.40 WIB di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPP)).

Pelaksanaan program secara transparan merujuk pada pendekatan yang jujur, terbuka, dan adil dalam menjalankan suatu program atau proyek. kejujuran merupakan hal yang sangat penting yang harus dimiliki oleh setiap orang, baik masyarakat atau pemerintah

Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi adalah organisasi hierarkis dan terstruktur yang digunakan dalam administrasi pemerintahan, perusahaan, atau organisasi lainnya. Struktur ini didasarkan pada prinsip pembagian tugas, tanggung jawab, dan otoritas yang jelas untuk mencapai tujuan dan fungsi tertentu. Struktur birokrasi sering kali digunakan untuk mengatur dan mengelola proses dalam skala besar dan kompleks, serta untuk memastikan efisiensi, pengambilan keputusan yang terinformasi, dan akuntabilitas.

Faktor pendukung dalam struktur birokrasi adalah telah dibuat *Standart Operational Procedure* (SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak agar dalam pelaksanaan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan. Kemudian yang kedua adalah faktor struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas pelaksanaan menjadi tidak fleksibel. penerapan SOP di dalam program BPS sangat penting untuk memastikan konsistensi dan efisiensi. Dengan mengikuti langkah-langkah yang telah ditetapkan dalam *Standart Operational Procedure* (SOP).

pembagian atau penyebaran tanggung jawab yang efektif dapat membantu meningkatkan produktivitas dan membantu mengurangi beban kerja individual dengan mengalokasikan tugas sesuai dengan keahlian dan kapabilitas masing-masing anggota tim, sehingga dapat mencapai tujuan program BPS secara efisien. Namun kekurangan dari pembagian tugas dalam Program BPS yaitu masyarakat kurang memahami tentang orang-orang yang ada dalam pelaksanaan program BPS termasuk juga tugas pokok dan fungsinya, yang mereka ketahui hanya dari pihak perangkat desa dan sebagian dari pihak dinas.

Mengenai hal tersebut juga dibenarkan oleh Bapak Sonya Agung Gatra Sucipto, ST Ahli Muda Penata Kelola Perumahan, beliau mengatakan :

"Organisasi penyelenggara kegiatan BSPS terdiri atas unsur di tingkat pusat, wilayah, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan Tim verifikasi terdiri dari unsur Balai P2P, Dinas PKP, Bappeda, Bapermas, Dinas Sosial, kecamatan, desa/kelurahan. Dalam hal kegiatan melibatkan kementerian atau pihak lain, tim verifikasi dapat berkolaborasi dengan tim verifikasi pihak terkait dan menghasilkan data yang disepakati bersama. Jadi harus saling bekerja sama diantara pihak-pihak tersebut ". (Sumber : Wawancara pada Senin 24 Juli 2023, Bapak Sonya Agung Gatra Sucipto, ST (43Th) pukul 09.55 WIB di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPP).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis kualitatif dengan metode wawancara, implementasi program bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) di Desa Selowogo Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo dapat disimpulkan bahwa :

1. Dari segi komunikasi, program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Selowogo Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo sudah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan secara efektif dan jelas untuk memastikan bahwa pesan atau informasi yang disampaikan ataupun diterima sudah baik dan benar agar terhindar dari kesalahpahaman atau *miss communication*.
2. Dari segi sumber daya, dari tenaga fasilitator lapangan hingga koordinator sudah melaksanakan tugasnya dengan baik sehingga program BSPS ini berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku.
3. Dari segi disposisi, upaya bersama dari tim pelaksana, perangkat desa, dan masyarakat penerima manfaat untuk menjaga komitmen, transparansi, dan akuntabilitas membantu memastikan bahwa program BSPS berjalan efektif, serta untuk memenuhi kebutuhan mereka dari rumah yang tidak layak huni menjadi rumah yang layak huni sehingga masyarakat dapat tinggal dengan nyaman.
4. Dari segi struktur birokrasi, pembagian tugas yang jelas, dan keterlibatan aktif dari tingkat pusat hingga desa adalah elemen penting dalam menjalankan program BSPS. Sehingga dapat merasakan hasil dari adanya program ini serta pelaksanaan yang sesuai dengan prosedur.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan kasih sayangnya sehingga penulisan skripsi yang berjudul "Implementasi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Selowogo Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo" dapat terselesaikan dengan baik. Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. Drs. Ec. Karnadi, M.Si, selaku Rektor Universitas Abdurachman Saleh Situbondo.
2. Drs. Senain, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Abdurachman Saleh Situbondo.
3. Drs. Hari Susanto, M.Si, selaku Dosen Pembimbing Utama, Nina Sa'idah Fitriyah, S.Sos, M.Si, selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan perhatian dalam penulisan skripsi ini;
4. Bapak/Ibu Dosen di Lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik;
5. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini tidak lepas dari kesalahan dan kekurangan. Penulis juga menerima segala kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

REFERENSI

- Akbar & Usman. (2009). *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Moleong, Lexy J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Ulber Silalahi. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama.